BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari usaha pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan hingga pada tingkat daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah tersebut maka masing-masing daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya, serta dengan adanya wewenang tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisi gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut (Zai et al., 2020).

Kualitas laporan keuangan yang baik, sebagaimana tercermin dari karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan lembaga legislatif (Sari, 2022). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah memiliki implikasi ekonomi dan substansial dalam proses pengambilan keputusan, baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif, khususnya dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan, mengevaluasi kinerja, memahami kondisi keuangan, serta mendukung perencanaan dan penyusunan anggaran (Hendri 2020).

Laporan keuangan pemerintah merupakan instrumen yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas publik, karena menyajikan informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat perhatian masyarakat terhadap integritas dan keandalan laporan keuangan sektor publik semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran negara maupun anggaran daerah.

Meskipun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan mendukung pengambilan keputusan, kondisi empiris menunjukkan bahwa permasalahan terkait kualitas laporan keuangan masih kerap terjadi di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara berkelanjutan mengungkap berbagai temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut antara lain berupa penyimpangan dan potensi kebocoran keuangan, yang mencerminkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memenuhi karakteristik dan nilai informasi sebagaimana yang dipersyaratkan (Ariyanto, 2021).

Selain itu, laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten mengindikasikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut, dalam situasi tertentu, berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga dapat menjadi dasar bagi BPK dalam memberikan opini tidak wajar. Lebih lanjut, melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, BPK mengungkapkan masih ditemukannya permasalahan ketidakpatuhan regulasi serta isu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program pemerintah daerah dengan nilai temuan mencapai Rp226,59 miliar (www.bpk.go.id).

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara harapan akan tersusunnya laporan keuangan daerah yang berkualitas, andal, dan sesuai standar dengan realitas yang terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, berbagai kendala seperti keterbatasan sistem, kompetensi sumber daya manusia, serta efektivitas pengendalian internal menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang ditetapkan, sehingga memunculkan kesenjangan antara tujuan ideal dan kondisi faktual di lapangan (Djawang et al., 2019).

Rendahnya kualitas pelaporan keuangan tersebut juga tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa masih terdapat laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian. Kondisi ini, pada beberapa kasus, menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, kualitas laporan keuangan yang belum optimal menyebabkan informasi yang disajikan tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan (Firmansyah, 2022). Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum secara optimal memanfaatkan situs web resmi sebagai sarana penyediaan informasi mengenai pengelolaan anggaran dan keuangan daerah kepada masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas publik (Hendri, 2020).

Laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada publik masih menghadapi berbagai permasalahan serta menimbulkan keraguan terkait tingkat kewajarannya. Kondisi tersebut juga tercermin pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum optimal. Selain itu, di Provinsi Jawa Barat, dari 27 kabupaten/kota, 19 daerah (sekitar 70%) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2024, sementara sisanya masih mendapatkan opini lain seperti WDP atau WTP dengan penekanan hal tertentu. Kondisi ini menunjukkan kualitas laporan keuangan daerah di Jawa Barat belum merata sepenuhnya, dengan masih adanya laporan yang belum memenuhi standar wajar tanpa pengecualian (Koran Pikiran Rakyat, 2024).

Salah satu daerah yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang masih mengalami ketidaktertiban dalam pengelolaan kas, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan aset yang belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengungkapan dalam laporan keuangan masih mengalami berbagai kendala, khususnya dalam penyajian informasi yang lengkap dan andal. Akibatnya, hal tersebut dapat

menimbulkan keraguan bagi para pengguna laporan keuangan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan.

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan yang merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020 hingga 2023 secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, pada tahun anggaran 2024 opini atas LKPD Kabupaten Kuningan mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada laporan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, BPK memberikan catatan temuan kepada pemerintah daerah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Kuningan. Temuan tersebut terutama berkaitan dengan permasalahan aset tetap, baik dari sisi penatausahaan, pencatatan, maupun pemanfaatannya, yang hingga kini masih belum terselesaikan secara menyeluruh. Banyaknya temuan audit BPK tersebut berdampak pada penyajian informasi yang seharusnya diungkapkan secara lengkap dan memadai oleh pemerintah daerah, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan opini audit yang dicapai pada laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan TA 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kuningan TA 2020-2024

No.	Tahun	Opini Audit	Catatan Opini
1.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan atau Dengan Catatan	• Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan Laporan Keuangan • Pengelolaan kas bendahara OPD dan bendahara BOS belum tertib • Penatausahaan asset tetap belum memadai

No.	Tahun	Opini Audit	Catatan Opini
2.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan atau Dengan Catatan	• Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Pengelolaan kas pada bendahara OPD dan bendahara BOS belum tertib • Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan
3.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	• Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Penganggaran pendapatan asli daerah tidak terukur • Biaya belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan
4.	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	• Masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya pada rekonsiliasi dan penatausahaan asset belum sepenuhnya tertib • Monitoring pelaksanaan anggaran pada beberapa perangkat daerah belum optimal • Beberapa pencatatan pendapatan dan belanja masih memerlukan verifikasi yang lebih memadai • Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pada beberapa uit kerja masih perlu ditingkatkan
5.	2024	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	• Adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan • Proses penganggaran serta pelaksanaan pendapatan dan belanja belum sepenuhnya

No.	Tahun	Opini Audit	Catatan Opini
			disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang terukur. • Realisasi belanja tidak sesuai serta kekurangan volume atas dua paket pekerjaan penanganan darurat bencana • Pengelolaan kas bendahara pengeluaran tidak sesuai ketentuan • Penggunaan kas tidak sesuai

Sumber: https://kuningankab.go.id/home/dokumen-lakip-satuan-kerja-perangkat-daerah/

Berdasarkan temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan selama Tahun Anggaran 2020-2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan secara konsisten mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut (2020-2023). Namun, Pada tahun 2024 opini BPK mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perubahan opini ini menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan yang sebelumnya bersifat korektif ternyata belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan ditemukan permasalahan yang lebih signifikan. Tentunya bila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka akan berdampak pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan masih lemah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan masih belum relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Hal ini menjadi fenomena karena pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana publik secara efektif, efisiensi, ekonomis dan juga patuh terhadap semua aturan serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dan akuntabel.

Selain itu, pemerintahan diharapkan agar tidak hanya mengejar WTP tetapi juga harus mengejar perbaikan pada pengelolaan *good governance* dan pelayanan kepada masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan adanya tuntutan *good governance* dalam efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (Mardiasmo, 2018).

Sementara itu dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah diharapkan berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditetapkan. Namun, permasalahan dalam akuntansi pemerintahan masih kerap muncul, terutama terkait dengan keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh belum memadainya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian terdahulu menunjukkan ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan yang akan dibahas dalam penelitian ini, faktor yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Menurut Irzal (2017) dalam Hasanah (2021) Sistem informasi akuntansi merupakan suatu komponen atau sub sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal lembaga/instansi. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat di operasikan tanpa menggunakan komputer, akan tetapi keterlibatan komputer dalam menangani tugas–tugas manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu.

Beberapa penelitian yang dilakukan Hasanah (2021), Fattah et al., (2023), dan Triyani (2018) memperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, perbedaan hasil penelitian yang diperoleh Bale et al., (2023) dan Suwandi (2025) memperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerpan *good governance*. Menurut Pangestu et al., (2025) penerapan *good governance* adalah tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi yang menjadi dasar sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan dan berkualitas di

lembaga pemerintah daerah. *Good governance* merupakan pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governance* menjadi salah satu alat ukur atau patokan bagi stakeholder dalam mengambil keputusan terutama keputusan berinvestasi, dengan sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dari negara.

Beberapa penelitian yang dilakukan Maulana (2021), Zai et al., (2020) dan Junyantara (2021) memperoleh hasil bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, perbedaan hasil penelitian yang diperoleh Fahrizal (2024) dan Nirmala et al., (2025) memperoleh hasil bahwa penerapan *good governance* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Sari et al., (2020) dalam Nur et al., (2023) Sistem pengendalian internal ialah suatu prosedur yang dilaksanakan serta berkeinginan guna mengarahkan aktivitas pemerintahan dengan maksud mencapai cita-citanya. Pengendalian intern ialah salah satu prosedur guna mengukur, membimbing, serta menunjukkan kegiatan atasan serta seluruh staf guna membagikan jaminan yang memadai, agar pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah bertambah baik, efisien serta efektif tercapainya tujuan pemerintahan. Perlu adanya sistem pengendalian internal pemerintah untuk diterapkan di dalam suatu pemerintahan di dalam suatu pemerintahan guna untuk mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan

dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya (Berliana, 2025).

Beberapa penelitian yang dilakukan Nur et al., (2023), Aldino et al., 2022) dan Hendaris, (2025) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, perbedaan hasil penelitian yang diperoleh Hasanah (2021) dan Albastiah (2021) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Suwandi (2025) Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu dalam suatu lembaga atau sistem untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peran sumber daya manusia adalah salah satu isu utama dalam organisasi, khususnya dalam upaya memperoleh tenaga kerja yang profesional dan kompeten secara tepat waktu, baik dalam penguasaan teknologi maupun dari sisi kemampuan manajerial. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi sumber daya manusia, karena keberadaan SDM yang memiliki kemampuan memadai akan menghasilkan laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu, relevan, dan dapat diperbandingkan. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami standar penyusunan laporan keuangan menyebabkan informasi yang dihasilkan belum memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas (Nurisma, 2024).

Beberapa penelitian yang dilakukan Suwandi (2025), Zai et al., (2020), dan Hadis (2022) memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, perbedaan hasil penelitian yang diperoleh Shohabatussa'adah (2021) dan Setiawati (2025) memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan, di antaranya oleh Sumastri (2021), Agustiningtyas et al., (2020), dan Animah et al., (2020). Namun, penelitian

yang secara khusus membahas pengaruh sistem informasi akuntansi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi, masih terbatas. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat sistem informasi akuntansi berperan strategis dalam menghasilkan data keuangan yang akurat, sementara penerapan *good governance* mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selain itu sistem pengendalian internal dapat menjadi faktor kunci dalam memastikan keandalan informasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dan menganalisis bagaimana ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Penelitian ini menambahkan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi karena berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian internal memang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun tingkat pengaruhnya masih berbeda-beda pada setiap penelitian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Uzaman (2026), Yamin et al., (2025) dan Listiarini et al., (2023) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh Calen et al., (2024), Saraswati (2019) dan Supriadi (2018) yang meyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sumastri (2021), Sambuaga et al., (2020) dan Palimbong (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa Meskipun demikian, pengaruh dari ketiga variabel tersebut belum tentu memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting karena keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, *good governance*, maupun sistem pengendalian internal

sangat bergantung pada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang baik, maka pemanfaatan sistem dan penerapan tata kelola dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi sumber daya manusia memainkan peran penting sebagai variabel moderasi karena memiliki kemungkinan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara sistem informasi akuntansi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu variabel penting yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama dalam hal kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan sistem akuntansi serta pengendalian yang efektif (Budiasih, 2019). Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan efektif dan efisien, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas (Sumastri, 2021). Dengan demikian, ketika kompetensi sumber daya manusia meningkat, hubungan antara sistem informasi akuntansi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan dapat semakin kuat, sedangkan jika kompetensi sumber daya manusia rendah, dampak dari ketiga faktor tersebut dapat melemah.

Penelitian ini penting dilakukan karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi perhatian dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Hal tersebut terlihat dari adanya temuan pemeriksaan BPK terkait kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta penurunan opini LKPD Kabupaten Kuningan yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan sistem informasi akuntansi, *good governance*, dan sistem pengendalian internal, serta menguji peran kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini memberikan

kontribusi dengan menempatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi yang masih relatif terbatas dikaji dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan research gap yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas Laporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan?
7. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan fakta dan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas Laporan keuangan.
2. Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Peran kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Peran kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Peran kompetensi sumber daya manusia dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dibidang akuntansi sektor publik mengenai bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sehingga dapat dijadikan perbandingan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegiatan penelitian ini selain memberikan manfaat teoritis diharapkan pula memberikan manfaat praktis bagi pihak – pihak terkait dengan penelitian yaitu:

1. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya SKPD Kabupaten Kuningan, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penguatan sistem informasi akuntansi, penerapan prinsip-prinsip *good governance*, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Pengelola Keuangan Daerah

   Bagi pejabat dan aparatur pengelola keuangan daerah, penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan serta pentingnya peningkatan kompetensi sebagai upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bacaan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan wawasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan serta pemikiran dalam penelitian lebih lanjut.